

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

##### **4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan adalah sukuk korporasi. Sampel pada penelitian ini adalah Sampel pada penelitian ini adalah Bank Syariah yang terdaftar di OJK sebanyak 34 perusahaan. Berikut profilperusahaan yang digunakan dalam penelitian :

##### **1. Bank Aceh Syariah**

Bank Aceh (dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Aceh/BPD Aceh) adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh. Bank Aceh berpusat di kota Banda Aceh. Bank Aceh didirikan pada tahun 1973 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Aceh (PT BPD Aceh). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Aceh atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

##### **2. Bank Muamalat Indonesia**

Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada 1 November 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi-hasil).

### **3. Bank Victoria Syariah**

PT. Bank Victoria Syariah (d/h. PT. Bank Swaguna) didirikan di kota Cirebon pada tahun 1966 dan mulai beroperasi tanggal 7 Januari 1967. Akuisisi saham PT. Bank Swaguna sebesar 99,80 % oleh PT. Bank Victoria International Tbk telah disetujui oleh Bank Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2007. September 2007 Bank telah meningkatkan modal disetor menjadi Rp 90 miliar dan pada Maret 2008 modal disetor Bank meningkat menjadi Rp 110 miliar. 19 Agustus 2009 Kantor Pusat pindah dari Jl. Fatmawati No.85-A Jakarta Selatan ke Permata Senayan Blok E 52-55 Jl. Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210. PT. Bank Victoria Syariah telah mendapatkan Izin Operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. 1 April 2010 beroperasi secara penuh dengan system syariah.

### **4. Bank BRI Syariah**

BRI Syariah adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 1969, dahulu bernama Bank Jasa Arta, lalu diambil alih Bank Rakyat Indonesia, menjadi Bank Umum Syariah pada 2008. UUS Bank BRI digabung pada 2009.

### **5. Bank BJB**

Bank BJB (dahulu dikenal dengan Bank Jabar Banten) adalah bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung. Bank ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 dengan bentuk perseroan terbatas (PT), kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini Bank BJB memiliki 63 Kantor Cabang, 311 Kantor Cabang Pembantu, 330 Kantor Kas, 1202 ATM BJB, 103 Payment Point, 4 Kantor Wilayah, dan 473 Waroeng BJB.

## **6. Bank BNI Syariah**

BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero, Tbk. Sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah.

## **7. Bank Syariah Mandiri**

Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.

## **8. Bank Mega Syariah**

Bank Mega Syariah adalah lembaga Perbankan syariah yang berpusat di Jakarta. Bank ini berawal dari anak usaha Asuransi Tugu yaitu PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) yang berdiri pada 14 Juli 1990. Pada 2001, bank ini diambil alih CT Corp (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo), pada tanggal 25 Juli 2004 di konversi menjadi Bank Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia disingkat BSMI, lalu resmi beroperasi sebagai bank syariah pada 25 Agustus 2004.

Pada tanggal 7 November 2007, melakukan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk, tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Pada tanggal 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi Bank devisa dan kemudian pada tanggal 8 April 2009 memperoleh izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dalam perjalanannya, Bank Mega Syariah telah melakukan perubahan logo dengan bentuk dan warna yang signifikan dengan logo Bank Mega serta kepindahan kantor pusatnya ke Menara Mega Syariah, Kuningan, Jakarta

## **9. Bank Panin Syariah**

Panin Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang berbasis di Jakarta. Bank ini dulunya bernama Bank Harfa yang berpusat di Surabaya yang berdiri sejak 1990.

PT Bank Panin Syariah (d/h PT Bank Harfa) berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 2 Desember 2009

## **10. Bank Syariah Bukopin.**

Bank Syariah Bukopin adalah lembaga keuangan yang berjenis Jasa Keuangan Perbankan. Sebagai salah satu bank nasional di Indonesia, sejarah Perseroan dimulai pada 1990 dengan meleburnya 2 (dua) bank pasar, yakni BPR Gunung Sindoro dan BPR Gunung Kendeng di Samarinda, Kalimantan Timur. Proses peleburan ini termaktub dalam Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990. Dengan peleburan ini, statusnya pun meningkat menjadi bank umum dengan nama PT Bank Swansarindo International. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 24/I/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991, PT Bank Swansarindo International memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan pemindahan kantor pusat ke Jakarta.

Dalam perkembangannya, atas dasar pertimbangan bisnis pada akhir 2002, Muhammadiyah, salah satu organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, mengakuisisi PT Bank Swansarindo International. Dengan persetujuan Bank Indonesia (BI) yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 dan dituangkan dalam Akta Nomor 109 tanggal 31 Januari 2003, PT Bank

Swansarindo International berubah nama menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia.

Untuk mengembangkan bisnis perusahaan, selama 2005-2008 PT Bank Bukopin, Tbk. terlibat dalam asistensi kegiatan operasional PT Bank Persyarikatan Indonesia. Tambahan modal juga diberikan PT Bank Bukopin, Tbk. untuk memperkuat bisnis PT Bank Persyarikatan Indonesia. Setelah beberapa tahun di bawah asistensi PT Bank Bukopin, Tbk. dan melihat peluang bisnis di perbankan syariah, PT Bank Persyarikatan Indonesia mengubah arah bisnisnya dari bank konvensional menjadi bank syariah. Izin usaha berdasarkan prinsip syariah pun diperoleh dari Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008. Atas dasar surat keputusan tersebut, nama PT Bank Persyarikatan Indonesia berubah menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Secara resmi Perseroan melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada Selasa, 11 Zulhijah 1430 H atau 9 Desember 2008.

### **11. Bank BCA Syariah**

BCA Syariah adalah lembaga perbankan syariah di Indonesia. Awalnya bank ini bernama Bank Utama Internasional (berdiri tahun 1990) dan diakuisisi oleh Bank Central Asia pada tahun 2009.

### **12. Bank Maybank Syariah Indonesia**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (sebelumnya bernama Bank Internasional Indonesia (BII) ) adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN.

Sebelumnya, bank ini bernama Bank Internasional Indonesia (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa

Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah *merger* menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989.

### **13. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Indonesia**

BTPN Syariah adalah bank umum syariah ke 12 yang ada di Indonesia, memiliki tekad untuk menumbuhkan jutaan rakyat Indonesia sehingga memiliki kehidupan yang baik sesuai dengan slogan Bank ini yaitu : Menjadi Bank Syariah Terbaik, untuk Keuangan Inklusif, Mengubah Hidup Berjuta Rakyat Indonesia.

### **14. Bank Danamon Indonesia**

Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia.<sup>[2]</sup> Pada tahun 1976 nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia.<sup>[2]</sup> Bank ini menjadi bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing pada tahun 1976<sup>[2]</sup> dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989.

Pada tahun 1997, sebagai akibat dari krisis finansial di Asia, Bank Danamon mengalami kesulitan likuiditas dan akhirnya oleh Pemerintah ditaruh dibawah pengawasan BPPN atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional (dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan nama IBRA) sebagai bank yang diambil alih Pemerintah (BTO-*Bank Take Over*).<sup>[2]</sup> Pada tahun 1999, Pemerintah melalui BPPN melakukan rekapitalisasi Bank Danamon sebesar Rp 32 miliar dalam bentuk Surat Hutang Pemerintah (*Government Bonds*). Pada tahun yang sama, beberapa bank BTO akhirnya digabung menjadi satu dengan Bank Danamon sebagai salah satu bagian dari rencana restrukturisasi BPPN.

Pada tahun 2000, Bank Danamon kembali melebarkan sayapnya dengan menjadi bank utama dalam penggabungan 8 bank BTO lainnya. Pada saat inilah Bank Danamon mulai muncul sebagai salah satu pilar ekonomi di Indonesia.

## **15. Bank Permata**

Bank Permata merupakan salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Tahun 2004 Standard Chartered Bank dan PT Astra Internasional Tbk mengambil alih PermataBank dan memulai transformasi besar-besaran di dalam organisasi. PermataBank memiliki visi menjadi pelopor dalam memberikan solusi finansial yang inovatif. Melayani sekitar 2 juta nasabah di 59 kota di Indonesia, per Oktober 2013 tercatat PermataBank memiliki 308 cabang (15 Cabang Syariah & 293 Cabang Konvensional), 20 Cabang Bergerak (Mobile Branch), 3 Payment Point, 888 ATM dengan akses di lebih dari 50.000 ATM (VisaPlus, Visa Electron, MasterCard, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima) dan jutaan ATM di seluruh dunia yang terhubung dengan jaringan Visa, MasterCard, Cirrus. Direktur Utamanya saat ini adalah Roy Arman Arfandy. Pengakuan terkini atas pencapaian PermataBank adalah 12 Penghargaan dari Asiamoney 2013 untuk Cash Management dan Foreign Exchange Products and Services; empat penghargaan International Business Awards (Stevie Award) atas kampanye kehumasan dan pemasaran tahunan; Bank dengan SMS Banking dan ATM Terbaik dalam Banking Service Excellence 2012-2013 dan peringkat ketiga Best Overall Performance serta peringkat teratas PermataBank Syariah dalam layanan prima terbaik tiga kali berturut-turut, Gold Award untuk Priority Banking dalam Service Quality Award 2013, Bank Syariah terbaik dengan asset >500 Miliar dari Karim Award 2013.

## **16. Bank Maybank Indonesia**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (sebelumnya bernama Bank Internasional Indonesia (BII) ) adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN.

Sebelumnya, bank ini bernama Bank Internasional Indonesia (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah *merger* menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989.

### **17. Bank CIMB Niaga**

PT Bank CIMB Niaga Tbk atau yang lebih dikenal dengan CIMB Niaga adalah sebuah bank yang berdiri pada tahun 1955. Saat ini CIMB Niaga merupakan bank terbesar keempat di Indonesia dilihat dari sisi aset, dan diakui prestasi dan keunggulannya di bidang pelayanan nasabah dan pengembangan manajemen. Saat ini mayoritas saham Bank CIMB Niaga dimiliki oleh CIMB Group. Bank CIMB Niaga merupakan bank pembayar (*payment bank*) KSEI terbesar dari nilai transaksi, dan dengan pangsa pasar 11%, saat ini CIMB Niaga adalah bank penyedia kredit kepemilikan rumah terbesar ketiga di Indonesia

### **18. Bank OCBC NISP**

Bank OCBC NISP (dahulu bernama Bank NISP) merupakan bank tertua keempat di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 4 April 1941 di Bandung dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank.

Bank NISP berkembang menjadi Bank yang solid dan handal, terutama melayani segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Bank NISP resmi menjadi bank komersial pada tahun 1967, bank devisa pada tahun 1990, dan perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994.

Pada akhir tahun 1990-an, Bank NISP berhasil melewati krisis keuangan Asia dan jatuhnya sektor perbankan di Indonesia tanpa dukungan pemerintah. Saat itu, Bank NISP menjadi salah satu bank pertama yang segera melanjutkan penyaluran kreditnya dalam masa krisis.



Reputasi Bank NISP yang baik di industrinya dan pertumbuhannya yang menjanjikan, telah menarik perhatian berbagai institusi internasional antara lain International Finance Corporation (IFC), bagian dari Grup Bank Dunia, yang memberikan pinjaman jangka panjang pada tahun 1999 dan kemudian menjadi pemegang saham pada tahun 2001 – 2010. Selain itu, sejak awal tahun 1990-an the Netherlands Development Finance Company (FMO) memberikan berbagai pinjaman jangka panjang dengan bunga menarik yang digunakan untuk penyaluran kredit pada segmen UKM.

### **19. Bank Sinarmas**

Bank Sinarmas berdiri pada 18 Agustus 1989 dengan nama Bank Shinta Indonesia. Namanya kemudian berubah menjadi Bank Sinarmas pada 2006. Bank ini mendapatkan status "bank persepsi" (bank pembayaran pajak) pada tahun 1994, dan berstatus bank devisa pada 1995, serta menjadi perusahaan publik pada 2010.

### **20. Bank Tabungan Negara**

Bank Tabungan Negara didirikan pada tahun 1897 sebagai bank tabungan pos dengan nama Postspaarbank, dengan kantor pusatnya berlokasi di Batavia. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, bank dibekukan dan diganti dengan Kantor Tabungan (Jepang: 貯金局 Hepburn: Chokin-kyoku, Nihon-shiki: Tyokin-kyoku) Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bank diambil alih oleh Pemerintah Indonesia pada 9 Februari 1950 di bawah UU Darurat No.9 dan berganti nama menjadi "Bank Tabungan Pos" (Bank Tabungan Pos). Pada tahun 1963 nama bank saat ini, Bank Tabungan Negara, diadopsi. Bank BTN menjadi bank pertama yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyediakan pembiayaan perumahan dan hipotek bagi individu berpenghasilan rendah dan menengah.

Bank menjalani restrukturisasi perusahaan pada tahun 2003, yang diikuti oleh penawaran umum perdana (IPO) pada tahun 2009 yang menyebabkan pencatatan Bank BTN di Bursa Efek Indonesia. IPO menduduki peringkat IPO terbesar di Indonesia pada 2009.

### **21. Bank BPD DKI**

Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Bank DKI adalah sebuah bank di Indonesia. Bank ini didirikan pada 11 April 1961 dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.

Bank DKI didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada saat pendirian, pemegang saham adalah Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebanyak 99,97% dan 0,03% saham dimiliki oleh PD. Pasar Jaya, dengan jumlah modal disetor sebesar Rp 3.900.000.000,00 (tiga trilyun sembilan ratus milyar rupiah).

Pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa. Pada tahun 1999, Bank DKI berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

### **22. Bank BPD DIY**

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau disingkat Bank BPD DIY, adalah sebuah bank BUMD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank BPD DIY didirikan pada tanggal 15 Desember 1961, berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian.

Landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, *junctis* Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan

Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sejak Januari 2007 Bank BPD DIY telah membuka unit perbankan Syariah. Hingga saat ini Bank BPD DIY setidaknya telah memiliki 175 tempat pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 1 kantor pusat, 7 kantor cabang, 15 kantor cabang pembantu, 73 kantor kas, 22 kantor payment point, 6 armada kas mobil dan 55 lokasi mesin ATM serta 4 kantor layanan syariah

### **23. Bank BPD Jateng**

Bank Jateng (dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/BPD Jateng) adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Bank Jateng berpusat di kota Semarang. Bank Jateng didirikan pada tahun 1963 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT BPD Jateng). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Jawa Tengah atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

### **24. Bank BPD Jatim**

Bank Jatim (dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Timur. Bank ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan bentuk perseroan terbatas (PT), kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

PT Bank Jatim menjadi bank devisa sejak tanggal 2 Agustus 1990. Pada tanggal 1 Mei 1999, dalam upayanya untuk meningkatkan

profesionalitas dan independensi sebagai pelayan masyarakat di bidang jasa keuangan, Bank Jatim mengubah bentuk badan hukum dari BUMD menjadi Perseroan Terbatas (PT).

## **25. Bank BPD Sumatra Utara**

PT BPD Sumut atau yang lebih dikenal dengan Bank Sumut adalah sebuah bank pembangunan daerah bersifat devisa didirikan pada tanggal 4 November 1961. Bank Sumut dibentuk dengan status Perseroan Terbatas.

Bank Sumut kemudian dialihkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun 1965 sebelum dikembalikan statusnya sebagai Perseroan Terbatas pada tahun 1999. Bank Sumut termasuk dalam jajaran Bank Pembangunan Daerah yang memiliki aset terbesar, saat ini asetnya telah mencapai 27 triliun dengan dukungan 200 unit kantor yang terdiri dari Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Cabang Unit Mikro serta payment point, dengan cakupan wilayah kerja hingga DKI Jakarta (Cabang Atrium Senen, Cabang Melawai dan Capem Cideng. Untuk mendukung layanan syariah, sejak tahun 2004 Bank Sumut juga telah membuka Unit Usaha Syariah yang saat ini telah memiliki 18 kantor cabang dan Capem dengan aset telah mencapai 1,5 triliun. Dalam rangka mendukung layanan jasa perbankan kepada masyarakat ATM bank Sumut juga telah bergabung dengan jaringan ATM Bersama, BANKCARD Malaysia, pembelian pulsa, pembayaran listrik, air dan berbagai macam jasa perbankan lainnya.

## **26. Bank BPD Jambi**

Bank Pembangunan Daerah Jambi didirikan berdasarkan akta Notaris Adi Putra Parlindungan No.6 tanggal 12 Februari 1959 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Dalam rangka penyempurnaan lembaga ini melalui akta Notaris Habropoerwanto No.70 tanggal 12 Oktober 1959 diadakan perubahan

seperlunya dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. J.A/5/115/6 tanggal 6 November 1969 dan dimuat pada tambahan Berita Negara RI No. 110.104 tanggal 29 Desember 1959.

Melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No.3 Tahun 1963 dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No. Des.9/32/127-164 tanggal 25 September 1964 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Bank Pembangunan Daerah Jambi.

BPD Jambi didirikan dengan maksud untuk menunjang serta mendorong pembangunan daerah dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mempertinggi taraf hidup rakyat.

Dalam menjalankan fungsinya BPD Jambi bertindak sebagai Bank Pembangunan, Bank Umum, Pemegang Kas Daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. 13 Tahun 1992, Modal Dasar BPD Jambi sebesar Rp 10 miliar, pada akhir tahun 1998 telah terpenuhi. Oleh karena Modal Dasar telah terpenuhi maka diadakan perubahan sebagian atas Peraturan Daerah No.13 Tahun 1992 yaitu dengan Peraturan Daerah No.5 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Jambi tentang Bank Pembangunan Daerah Jambi.

## **27. Bank BPD Sumatra Barat**

Bank Nagari (merupakan sebutan untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat/BPD Sumbar) adalah satu-satunya bank milik pemerintah daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatra Barat. Bank Nagari berpusat di kota Padang. Bank Nagari didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat (PT BPD Sumbar). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatra Barat atas dasar

pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Sampai saat sekarang ini Bank Nagari telah tersebar di beberapa kota atau kabupaten di Sumatra Barat bahkan telah ada di kota luar Sumatra Barat, yaitu Jakarta, Bandung dan Pekanbaru.

### **28. Bank BPD Riau dan Kep.Riau**

Berdiri pada 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau. Pada 1966, PT BAPERI masuk ke BPD Riau, hal ini disebabkan peraturan Bank Pembangunan daerah berstatus PD pada 1962. Secara resmi, kembali berstatus Perseroan Terbatas pada 2002.

### **29. Bank BPD Sumatra Selatan dan Bangka Belitung**

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung didirikan pada tanggal 6 November 1957 (umur 61) dengan nama PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan yang didirikan berdasarkan:

- Keputusan Panglima Ketua Penguasa Perang Daerah Sriwijaya Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 132/SPP/58 tanggal 10 April 1958 dengan berlaku surut, mulai tanggal 6 Nopember 1957.
- Akta Notaris Tan Thong Khe Nomor 54 tanggal 29 September 1958 dengan izin Menteri Kehakiman No. J.A.5/44/16 tanggal 11 Mei 1959.
- Izin Usaha Bank dari Menteri Keuangan Nomor 47692/UM II tanggal 18 April 1959.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1962 tentang "*Bank Pembangunan Daerah*", maka terhitung sejak tahun 1962, secara resmi seluruh kegiatan PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan status badan hukum perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11/DPRDGR Tingkat I Sumatera Selatan, dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri

Urusan Bank Central/Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/Kep/MUBS/G/63 Tanggal 27 Februari 1963

### **30. Bank BPD Kalimantan Selatan**

PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel atau yang dikenal dengan Bank Kalsel adalah sebuah bank yang berdiri pada 1964.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Pemerintah Kota/ Kabupaten Se-Kalimantan Selatan dan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964 atas dasar Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) serta memperoleh izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965.

Seiring perjalanan waktu, guna penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi, telah dilakukan beberapa kali pergantian Peraturan Daerah. Saat ini landasan hukum yang mengatur pendirian Bank BPD Kalsel adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008, di mana modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah).

### **31. Bank BPD Kalimantan Barat**

BankKalbar adalah LembagaKeuangan berjenis Perbankan Daerah di Indonesia. Bank ini berpusat di Pontianak, Kalimantan Barat.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan pada tanggal 15 April 1964 berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1963 dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah (PD). Izin usaha dikeluarkan oleh

Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 44/63/Kep/MUBS/G tanggal 28 Nopember 1963.

Tahun 1999 merupakan tonggak sejarah baru bagi Bank Kalbar, di mana berdasarkan Perda No. 1 tanggal 2 Februari 1999 terjadi perubahan status hukum Bank Kalbar dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yaitu dengan Akta Notaris Widiyansyah, SH No. 81 tanggal 23 April 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 5 Mei 1999 No. C2-8229 HT.01.01 Tahun 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 56 tanggal 13 Juli 1999.

### **32. Bank BPD Kalimantan Timur**

Didirikan 14 Oktober 1965, kelahiran Bank BPD Kaltim bertujuan membantu dan mendorong pertumbuhan, perekonomian serta pembangunan daerah. Kehadiran Bank BPD Kaltim juga dimaksudkan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kelahirannya dibidani Gubernur KDH Tk. I Kaltim saat itu A. Moeis Hasan, dengan payung hukum Perda. Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 03/PD/64 tanggal 19 September 1964. Tanggal 01 April 1965, pendirian Bank BPD Kaltim mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan SK No.9/10/8-45.

Operasional Bank BPD Kaltim makin luwes, dengan terbitnya Izin Usaha dari Menteri Urusan Bank Central / Bank Indonesia Nomor : Kep.95/PBS/65 tanggal 21 September 1965.

Perda. No. 03/PD/64 yang menjadi landasan hukum pertama kelahiran Bank BPD Kaltim, seiring waktu mengalami perubahan. Hingga terakhir, pendirian Bank BPD Kaltim diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 11 Februari 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.



Sejalan waktu, Bank BPD Kaltim makin berkembang. Sejumlah sektor usaha mulai dilirik untuk digarap. Namun payung hukum yang ada, membatasi ruang gerak Bank BPD Kaltim untuk berkembang dinamis.

Antisipasi pun dilakukan pemilik, yakni Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim, yang mengusulkan kembali perubahan Perda No 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kaltim. Tanggal 26 April 2006 lahirlah Perda Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

### **33. Bank BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat**

Bank BPD Sulselbar atau yang lebih dikenal dengan Bank Sulselbar adalah salah satu bank yang berdiri pada 1961.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama awal PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Provinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 miliar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus [[Perusahaan Daerah]] (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 miliar.

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk mengubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

#### **24. Bank BPD NTB**

Atas kuasa Undang-undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah

Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 1963 telah menetapkan berdirinya Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (BPD NTB) dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp.60 juta , dengan landasan operasionalnya adalah izin usaha Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia Nomor 45/63/MUBS/6 tanggal 20 Nopember 1963.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah No.6 Tahun 1963, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat telah meresmikan mulai beroperasinya BPD NTB pada tanggal 05 Juli 1964, selanjutnya diperingati sebagai Hari Ulang Tahun BPD. NTB.

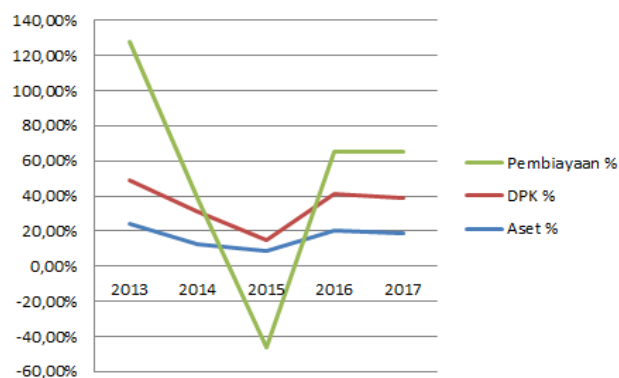
Dengan bertitik tolak kepada maksud dan tujuan pendirian BPD.NTB telah diarahkan untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No.14 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang pokok-pokok perbankan telah diadakan penyempurnaan peraturan pendiriannya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1974, tentang perubahan yang pertama kali peraturan daerah tentang pendirian BPD NTB dengan modal dasar ditingkatkan menjadi Rp.100 juta.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur antara lain mengenai pemilikan dan bentuk hukum pendirian bank, maka BPD NTB telah mengadakan perubahan bentuk hukum pendiriannya. Dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 1999 tanggal 15 Februari 1999, Modal dasar BPD NTB ditetapkan sebesar Rp.100 miliar.

#### **4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian**

*Market share* perbankan syariah artinya presentase dari luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh perbankan syariah dari total pasar

industri perbankan nasional. Market Share Bank Syariah terdiri tiga komponen yang penting yaitu aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan. Aset penting untuk meningkatkan market share dikarenakan jika bank syariah memiliki aset yang sangat baik maka bisa menaikkan market share ( pangsa pasar ) bank syariah, dana pihak ketiga juga bisa menaikkan market share bank syariah karena dana pihak ketiga merupakan investasi bagi nasabah, dan pembiayaan juga penting untuk meningkatkan market share karena jika banyak nasabah yang meminjam uang dengan bank syariah maka semakin banyak orang yang menggunakan produk dan jasa bank syariah maka dapat menaikkan market share bank syariah.



(Data sekunder diolah, 2019)

#### Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia

Dilihat dari gambar diatas laju pertumbuhan bank syariah di indonesia bahwa aset tahun 2013 sebesar 24,23% turun menjadi 12,41% di tahun 2014, sampai tahun 2015 terus menurun diangka 8,78%, lalu ditahun 2016 naik menjadi 20,33% dan tahun 2017 turun menjadi 18,98%.

DPK tahun 2013 – 2015 terus mengalami penurunan hingga diangka 6,11%, lalu ditahun 2016 naik menjadi 20,83% dan mengalami penurunan ditahun 2017 turun menjadi 19,83%. Pembiayaan dari tahun 2013 – 2015 terus mengalami penurunan hingga -60,93%. Lalu ditahun 2016 -2017 mengalami kenaikan sebesar 26,04%.

Gubernur BI dalam situs resmi Bank Indonesia menyebutkan bahwa di Indonesia 80% aset yang dimiliki oleh industri keuangan, masih dimiliki industri perbankan. Dengan demikian, perbankan mempunyai pangsa pasar sebesar 80% dari keseluruhan sistem keuangan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah juga memberikan dukungan ditandai dengan dibuatnya undang-undang yang mengatur industri perbankan syariah melalui UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Besarnya jumlah ini menunjukkan bahwa sektor perbankan di Indonesia seharusnya memiliki perkembangan yang sangat pesat melihat dari peningkatan kebutuhan umat Islam untuk berinvestasi pada sektor keuangan dengan prinsip syariah.

#### 4.2 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

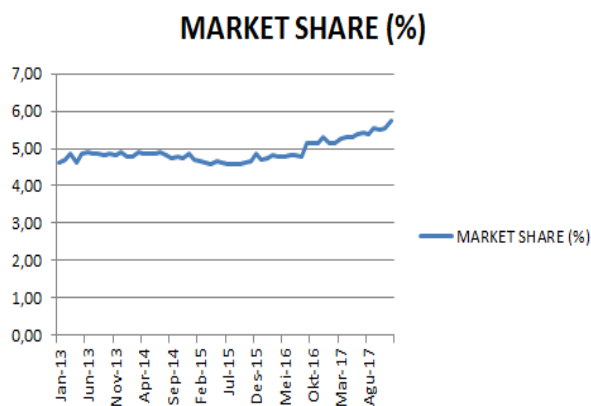
**Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Market Share	60	,046	,057	,04918	,002849
CAR	60	,185	,294	,22535	,026173
ROA	60	,001	,025	,01295	,005047
NPF	60	,025	,051	,03875	,006663
FDR	60	,853	1,048	,94588	,059618
Equivalent Rate	60	,034	,066	,04900	,008561
Valid N (listwise)	60				

(Data sekunder diolah, 2019)

## 1. Market Share

Berdasarkan tabel 4.2 variabel dependen Market Share Bank Syariah memiliki nilai mean 4,91 % yang menandakan rata-rata market share saat periode penelitian yakni tahun 2013 hingga 2017. Hal ini cukup baik mengingat tidak stabilnya kondisi industri perbankan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nilai terendah market share berada pada angka 4,60% dan yang tertinggi pada angka 5,70%. Standar Deviasi market share sebesar 0,2%.



(Data sekunder diolah, 2019)

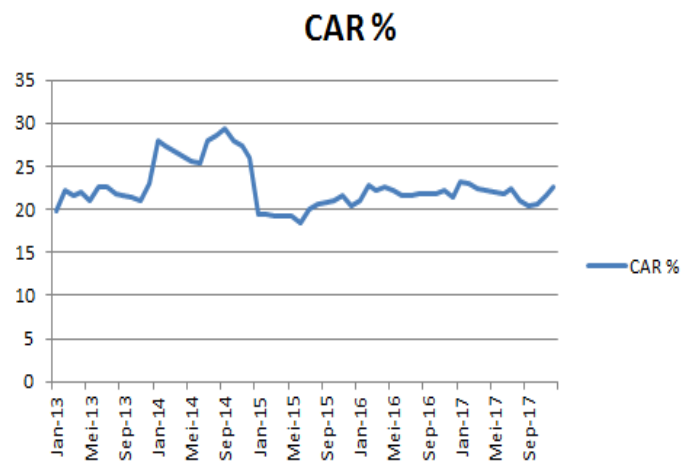
**Gambar 4.2 Market Share**

Derajat kekuatan *Market share* umumnya akan muncul ketika nilai *Market share* suatu perusahaan sudah mencapai 15%. Pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu 25-50% dapat dikatakan perusahaan memiliki market power yang sangat besar, dan berpotensi terjadinya monopoli. Sebaliknya apabila *Market share* suatu perusahaan nilainya kecil akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu bersaing dalam industri.

## 2. Capital Adequacy Ratio

Berdasarkan tabel 4.2 variabel CAR mempunyai nilai mean sebesar 22,53%. Hal ini menandakan bahwa bank syariah dalam periode

penelitian tahun 2013 hingga 2017 memiliki kecukupan modal yang baik, dimana menurut Bank Indonesia (BI) nilai minimal CAR adalah 8%. Nilai terendah CAR adalah 18,5. Sedangkan nilai tertingginya yaitu sebesar 29,4% . Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, bank syariah di Indonesia dalam periode penelitian memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik. Standar deviasi CAR 2,61%.

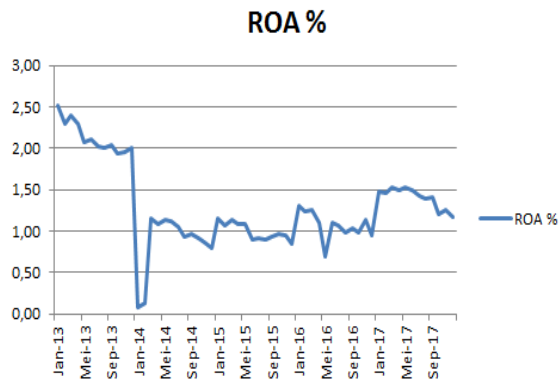


(Data sekunder diolah, 2019)

**Gambar 4.3 Capital Adequacy Ratio**

### 3. Return On Asset

Berdasarkan tabel 4.2 ROA mempunyai nilai mean sebesar 1,29%. Nilai terendah ROA adalah 0,1% yang berarti aset yang dimiliki tidak dikelola dengan efisien untuk menghasilkan profit, dimana pada periode tersebut hampir 0% profit yang dihasilkan bank syariah. Sedangkan nilai tertingginya yaitu sebesar 2,52% hal ini menunjukkan bank syariah dalam kondisi yang sehat dengan tingkat profitabilitas yang cukup menjanjikan. Standar deviasi sebesar 0,50%.

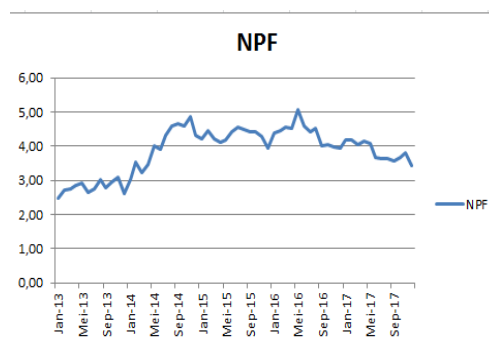


(Data sekunder diolah, 2019)

**Gambar 4.4 Return On Assets**

#### 4. Non Performing Financing

Berdasarkan tabel 4.2 variabel NPF memiliki nilai mean 3,87% Nilai NPF yang baik menurut Bank Indonesia (BI) berada di angka < 8%. Nilai terendah NPF berada pada angka 2,50% dan yang tertinggi pada angka 5,1%. Standar Deviasi NPF sebesar 0,66%. Hal ini menandakan bahwa NPF bank syariah dalam periode penelitian tahun 2013 hingga 2017 dalam kondisi yang baik.



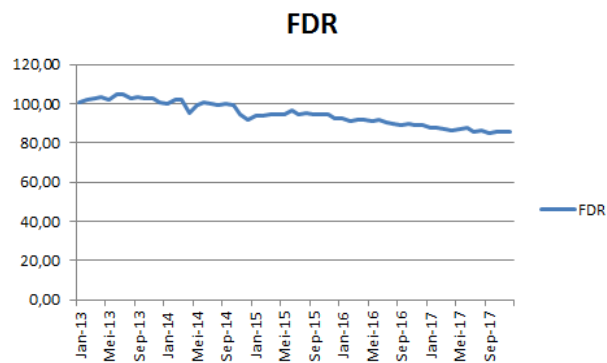
(Data sekunder diolah, 2019)

**Gambar 4.5 Non performing Financing**



## 5. Financing To Deposit Ratio

Berdasarkan tabel 4.2 FDR mempunyai nilai mean sebesar 94,58%. Nilai FDR yang baik menurut Bank Indonesia (BI) berada di antara 78-100%. Hal ini menandakan bahwa FDR bank syariah dalam periode penelitian tahun 2013 hingga 2017 dalam kondisi yang baik. Nilai terendah FDR adalah 85,30% menunjukkan kondisi pembiayaan bank syariah pada periode tersebut dalam keadaan yang baik. Sedangkan nilai tertingginya yaitu sebesar 104,8% hal ini menunjukkan bahwa bank syariah masih kurang efisien mengelola dana yang ada. Standar deviasi FDR sebesar 5,96%.

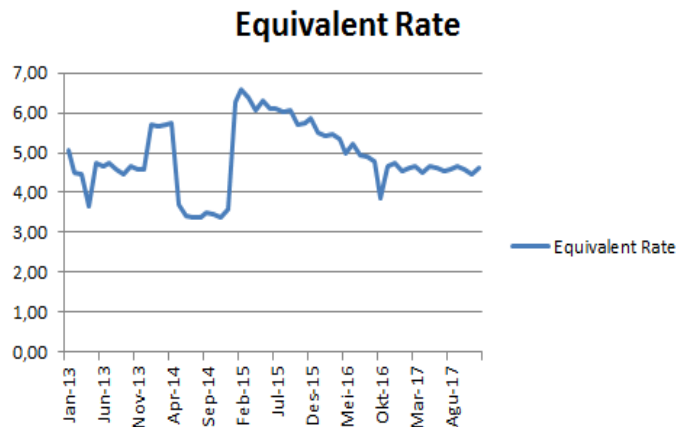


(Data sekunder diolah, 2019)

**Gambar 4.6 Financing To Deposit Ratio**

## 6. Equivalent Rate

Berdasarkan tabel 4.2 variabel Equivalent Rate memiliki nilai mean 4,90% Nilai terendah Equivalent Rate berada pada angka 3,40% dan yang tertinggi pada angka 6,6%. Standar Deviasi market share sebesar 0,85%.



(Data sekunder diolah, 2019)

**Gambar 4.7 Equivalent Rate**

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

Pengunaan analisis regresi dalam statistik harus bebas dari asumsi-asumsi klasik. Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk menentukan apakah variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas sampel digunakan menggunakan uji *kolmogrov smirnov*.

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,00114853
	Absolute	,094
Most Extreme Differences	Positive	,054
	Negative	-,094
Kolmogorov-Smirnov Z		,725
Asymp. Sig. (2-tailed)		,670

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

(Data sekunder diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh nilai Asymp.Sig.(2-tailed) kolmogorovsmirnov pada understandardized residual sebesar 0,670 lebih besar dari alpha (0,05) maka  $H_0$  diterima artinya data residual berdistribusi normal. Sehingga dapat dinyatakan bahwa residual pada model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### 4.3.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan gangguan pada fungsi regresi yang berupa korelasi di antara faktor gangguan. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data time series, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya.

**Tabel 4.3 Karakteristik uji statistik Durbin Watson (d)**

<b>Nilai Statistik D</b>	<b>Hasil</b>
$0 < d < d_L$	Menolak Hipotesis nol, Ada autokorelasi positif
$d_L < d < d_U$	Daerah Keragu - ragan, tidak ada keputusan
$d_U < d < 4 - d_L$	menerima hipotesis nol, tidak ada autokorelasi positif / negatif
$4 - d_U < d < 4 - d_L$	Daerah Keragu - ragan, tidak ada keputusan

$4-dL < d < 4$	Menolak hipotesis nol, ada autokorelasi negatif
----------------	---

Hasil perhitungan melalui program SPSS diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,915 <sup>a</sup>	,838	,822	,001201	1,378

a. Predictors: (Constant), Equivalent Rate, FDR, ROA, NPF, CAR

b. Dependent Variable: Market Share  
(Data sekunder diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 4.4, diperoleh nilai Durbin-Watson pada model regresi yaitu sebesar 1,378 lebih besar dari  $dU$  (1,767) dan lebih kecil dari  $4-dU=4-1,767=2,233$  atau  $dU(1,767) < d(1,230) < 4-dU(4-1,767=2,233)$  sehingga pada model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi positif dan autokorelasi negatif.

#### 4.3.3 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah kondisi dimana peubah-peubah bebas memiliki korelasi diantara satu dengan yang lainnya. Jika peubah-peubah bebas memiliki korelasi sama dengan satu atau berkorelasi sempurna mengakibatkan koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat diperkirakan dan nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tak hingga.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas**

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
,281	3,564
,261	3,836
,423	2,364
,534	1,873
,358	2,796

(Data sekunder diolah, 2019)

**Tabel 4.6 Kesimpulan Uji Multikolinieritas**

Variabel	Nilai Tolerance	Kondisi	VIF	Kondisi	Kesimpulan
CAR (X1) Terhadap Market Share	0,281	<i>Tolerance</i> > 0,1	3.564	VIF < 10	Tidak ada gejala
ROA (X2) Terhadap Market Share	0,261	<i>Tolerance</i> > 0,1	3,836	VIF < 10	Tidak ada gejala
NPF (X3) Terhadap Market Share	0,423	<i>Tolerance</i> > 0,1	2,364	VIF < 10	Tidak ada gejala
FDR (X4) Terhadap Market Share	0,534	<i>Tolerance</i> > 0,1	1,873	VIF < 10	Tidak ada gejala
Equivalent Rate (X5) Terhadap Market Share	0,358	<i>Tolerance</i> > 0,1	2,796	VIF < 10	Tidak ada gejala

(Data sekunder diolah, 2019)

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10 atau nilai Tolerance Value

masingmasing variabel lebih besar dari 0,1 maka tidak terdapat gejala multikolenieritas antar variebel independen.

#### 4.3.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar 4.8 Uji Heterokedastisitas**

Berdasarkan uji scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas.

#### 4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Regresi Linear Berganda. Regresi linear Berganda digunakan untuk melakukan pengujian pengaruh antara sebuah variabel dependent (terikat) dengan satu atau beberapa variabel independent (bebas) yang ditampilkan dalam bentuk regresi.

Di dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel sebagai indikatornya yaitu CAR, ROA, NPF, FDR, dan Equivalent Rate yang mempengaruhi variabel lainnya yaitu nilai perusahaan, maka digunakan model estimasi yang membentuk persamaan regresi linier berganda. Persamaan umum regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= Nilai estimasi Market Share
X <sub>1</sub>	= CAR
X <sub>2</sub>	= ROA
X <sub>3</sub>	= NPF
X <sub>4</sub>	= FDR
X <sub>5</sub>	= Equivalen Rate
a	= Konstanta
e	= eror

Dari hasil pengolahan melalui program SPSS diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,110	,005		22,555	,000
CAR	,013	,011	,119	1,147	,257
ROA	-,076	,061	-,135	-1,259	,213
NPF	-,312	,036	-,730	-8,654	,000
FDR	-,048	,004	-1,011	-13,472	,000
Equivalent Rate	-,108	,031	-,323	-3,525	,001

a. Dependent Variable: Market Share  
(Data sekunder diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0,110 + 0,013X_1 - 0,076X_2 - 0,312X_3 - 0,048X_4 - 0,108X_5$$

Artinya :

- a. Kostanta sebesar 0,110 menyatakan bahwa jika  $X_1$  (CAR) ,  $X_2$  (ROA) ,  $X_3$ (NPF),  $X_4$  (FDR) dan  $X_5$  (Equivalent Rate) bernilai 0 maka Market Share sebesar 0,110 satu satuannya.
- b. Koefisien CAR sebesar 0,013, menyatakan bahwa setiap penambahan CAR sebesar 1% , maka akan menaikkan Market Share sebesar 1,3%.
- c. Koefisien ROA sebesar -0,076, menyatakan bahwa setiap penambahan ROA sebesar 1%, maka akan menurunkan Market Share sebesar 7,6%.
- d. Koefisien NPF sebesar -0,312, menyatakan bahwa setiap penambahan NPF sebesar 1%, maka akan menurunkan Market Share sebesar 31,2%



e. Koefisien FDR sebesar  $-0,048$  , menyatakan bahwa setiap penambahan FDR sebesar 1%, maka akan menurunkan Market Share sebesar 4,8%.

f. Koefisien Equivalent Rate sebesar  $-0,108$ , menyatakan bahwa setiap penambahan Equivalent Rate sebesar 1%, maka akan menurunkan Market Share sebesar 10,8%.

## 4.5 Pengujian Hipotesis

### 4.5.1 Koefisien Determinasi (R Squared)

Dalam regresi berganda kita menggunakan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) yang sesuai untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variable independen.

**Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square
1	,915 <sup>a</sup>	,838

(Data sekunder diolah, 2019)

Dari tabel diatas diperoleh nilai Koefisien Determinasi R<sup>2</sup> (R Square) sebesar 0,849. Menunjukkan bahwa kemampuan X1 (CAR), X2 (ROA), X3 (NPF) X4 (FDR) dan X5( Equivalent Rate) dalam menjelaskan variabel Y (Market Share) sebesar 83,80%, sedangkan sisanya sebesar 16,20% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar penelitian ini. Dikarenakan besarnya R-squared yang masih belum cukup mendekati 1 (satu) yang menandakan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen masih terbatas

### 4.5.2 Uji t Test

Uji parsial (t test) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Keputusan menolak atau menerima H<sub>0</sub>

1. Jika  $t_{hitung} > t_{table}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

2. Jika  $t_{hitung} < t_{table}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Hasil t-hitung variabel independen terhadap variabel nilai sukuk korporasi sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Hasil uji t (Secara Parsial)**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,110	,005		22,555	,000
CAR	,013	,011	,119	1,147	,257
ROA	-,076	,061	-,135	-1,259	,213
NPF	-,312	,036	-,730	-8,654	,000
FDR	-,048	,004	-1,011	-13,472	,000
Equivalent Rate	-,108	,031	-,323	-3,525	,001

a. Dependent Variable: Market Share  
(Data sekunder diolah, 2019)

**Tabel 4.10**  
**Kesimpulan Hasil uji t (Secara Parsial)**

Variabel	$t_{hitung}$	$t_{table}$	Sig	Alpha	Kondisi	Kesimpulan
CAR (X1) Terhadap Market Share	1,147	2,004	0,257	0,05	$t_{hitung} < t_{table}$	$H_0$ diterima dan $H_a$ ditolak
ROA (X2) Terhadap Market Share	-1,259	2,004	0,213	0,05	$t_{hitung} < t_{table}$	$H_0$ diterima dan $H_a$ ditolak
NPF (X3) Terhadap Market Share	-8,654	2,004	0,000	0,05	$t_{hitung} < t_{table}$	$H_0$ diterima dan $H_a$ ditolak
FDR (X4) Terhadap	-13,472	2,004	0,000	0,05	$t_{hitung} < t_{table}$	$H_0$ diterima

Market Share					< t-table	dan Ha ditolak
Equivalent Rate (X1) Terhadap Market Share	-3,525	2,004	0.001	0,05	t-hitung < t-table	Ho diterima dan Ha ditolak

(Data sekunder diolah, 2019)

Perhitungan pada tabel 4.8 diatas sebagai berikut :

Nilai  $t_{tabel} n - k - 1 = 60 - 5 - 1 = 54$ , sehingga diperoleh ttabel sebesar 2,004. Dari hasil perhitungan pada 4.15 diatas diperoleh sebagai berikut :

a. Pengaruh CAR Terhadap Market Share Bank Syariah (Hipotesis 1)

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 yang ditunjukkan terlihat bahwa CAR menunjukkan hasil thitung sebesar 1,147. Jika dibandingkan dengan t-tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2.004, maka  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $1,147 > 2.004$ ). Nilai probabilitas signifikansi CAR sebesar 0,257 menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai  $\alpha$  pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 ( $0,257 > 0,05$ ), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel nilai CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap Market Share Bank Syariah.

b. Pengaruh ROA Terhadap Market Share Bank Syariah (Hipotesis 2)

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 yang ditunjukkan terlihat bahwa ROA menunjukkan hasil thitung sebesar -1,259. Jika dibandingkan dengan t-tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2.004, maka  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $-1,259 < 2.004$ ). Nilai probabilitas signifikansi ROA sebesar 0,213 menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai  $\alpha$  pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 ( $0,213 > 0,05$ ),

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel nilai ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap Market Share Bank Syariah.

c. Pengaruh NPF Terhadap Market Share Bank Syariah (Hipotesis 3)

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 yang ditunjukkan terlihat bahwa NPF menunjukkan hasil thitung sebesar -8,654. Jika dibandingkan dengan t-tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2.004, maka  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $-8,654 < 2.004$ ). Nilai probabilitas signifikansi NPF sebesar 0.000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$  pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 ( $0.000 < 0,05$ ), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel nilai NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap Market Share Bank Syariah.

d. Pengaruh FDR Terhadap Market Share Bank Syariah (Hipotesis 4)

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 yang ditunjukkan terlihat bahwa FDR menunjukkan hasil thitung sebesar -13,472. Jika dibandingkan dengan t-tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2.004, maka  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $-13,472 < 2.004$ ). Nilai probabilitas signifikansi FDR sebesar 0.000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$  pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 ( $0.000 < 0,05$ ), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel nilai FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap Market Share Bank Syariah.

e. Pengaruh Equivalent Rate Terhadap Market Share Bank Syariah (Hipotesis 5)

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 yang ditunjukkan terlihat bahwa Equivalent Rate menunjukkan hasil thitung sebesar -3,525. Jika dibandingkan dengan t-tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2.004, maka  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$

(-3,525 < 2.004). Nilai probabilitas signifikansi Equivalent Rate sebesar 0.000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$  pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 ( $0.001 < 0,05$ ), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel nilai Equivalent Rate berpengaruh negatif signifikan terhadap Market Share Bank Syariah.

## **4.6 Pembahasan**

Penelitian ini menguji pengaruh CAR, ROA, NPF, FDR, dan Equivalent Rate terhadap Market Share Bank Syariah di Indonesia. Berdasarkan pada pengujian empiris yang telah dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen di atas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Market Share). Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan sukuk di Indonesia hanya NPF, FDR dan Equivalent Rate.

### **4.6.1 Pengaruh CAR Terhadap Market Share Bank Syariah di Indonesia**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap Market Share (Y) Bank Syariah. Hal ini berarti jika tingkat CAR mengalami penurunan, maka akan berdampak pada meningkatnya tingkat market share bank syariah. Salah satu faktornya adalah pembiayaan bank syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir dalam kondisi yang kurang baik. Jadi walaupun CAR dalam keadaan yang baik, akan sia-sia jika bank tidak mampu mengelola modal yang dimilikinya dengan baik.

Fenomena yang tengah dihadapi perbankan syariah yaitu sulitnya menembus pangsa pasar yang sebenarnya sangat besar bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan teori market share perbankan syariah dimana perusahaan dengan nilai pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati keuntungan dan penjualan produk dengan lebih baik ketimbang pesaingnya. Kurang efisiennya pengelolaan dana

salah satunya berdampak pada pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah mampu mengakibatkan hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan dan juga menurunkan minat masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah. Hal tersebut tentu saja berpengaruh buruk pada market share. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang Saputra (2014) dimana disebutkan bahwa faktor Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap market share bank syariah di Indonesia.

#### **4.6.2 Pengaruh ROA Terhadap Market Share Bank Syariah di Indonesia**

Hasil penelitian ini menunjukkan Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap Market Share (Y) Bank Syariah. Hal ini berarti jika tingkat ROA mengalami kenaikan, maka akan berdampak pada meningkatnya market share bank syariah.

Fenomena yang tengah dihadapi perbankan syariah yaitu sulitnya menembus pangsa pasar yang sebenarnya sangat besar bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan teori market share perbankan syariah dimana perusahaan dengan nilai pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati keuntungan dan penjualan produk dengan lebih baik ketimbang pesaingnya.. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin baik pula market share-nya. Apabila profitabilitas suatu bank tersebut memiliki peningkatan yang signifikan, maka masyarakat akan mau mempercayakan dananya di bank tersebut. Karena masyarakat akan memperhitungkan keuntungan bagi hasil yang mungkin diperoleh. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula kinerja dan posisi market share bank tersebut. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang Saputra, (2014) dimana disebutkan dalam penelitian tersebut bahwa faktor Return On Assets (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan

serta memiliki hubungan yang kuat terhadap market share bank syariah di Indonesia.

#### **4.6.3 Pengaruh NPF Terhadap Market Share Bank Syariah di Indonesia**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Market Share (Y) Bank Syariah. Hal ini berarti bahwa semakin banyaknya pembiayaan bermasalah membuat bank syariah tidak berani meningkatkan penyaluran pembiayaannya apalagi bila dana pihak ketiga tidak dapat dicapai secara optimal maka dapat mengganggu likuiditas suatu bank.

Fenomena yang tengah dihadapi perbankan syariah yaitu sulitnya menembus pangsa pasar yang sebenarnya sangat besar bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan teori market share perbankan syariah dimana perusahaan dengan nilai pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati keuntungan dan penjualan produk dengan lebih baik ketimbang pesaingnya. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi peningkatan pangsa pasar bank. Adanya pembiayaan bermasalah yang besar dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga berpengaruh buruk pada market share. Dengan demikian semakin besar NPF akan mengakibatkan menurunnya market share. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang Saputra, (2014) dimana disebutkan dalam penelitian tersebut bahwa NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap market share bank syariah di Indonesia.

#### **4.6.4 Pengaruh FDR Terhadap Market Share Bank Syariah di Indonesia**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Financing To Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap Market Share (Y) Bank Syariah. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi FDR maka akan semakin tinggi Market Share.

Fenomena yang tengah dihadapi perbankan syariah yaitu sulitnya menembus pangsa pasar yang sebenarnya sangat besar bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan teori market share perbankan syariah dimana perusahaan dengan nilai pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati keuntungan dan penjualan produk dengan lebih baik ketimbang pesaingnya. Semakin menurunnya dana pembiayaan oleh Pihak Ketiga Bank Syariah maka, semakin menurun pula laba bank yang pada akhirnya menimbulkan penurunan pembiayaan dan mengakibatkan rendahnya market share bank syariah, dengan asumsi bank belum menyalurkan dananya untuk pembiayaan yang efektif. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang Saputra, (2014) dimana disebutkan dalam penelitian tersebut bahwa FDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap market share bank syariah di Indonesia.

#### **4.6.5 Pengaruh Equivalent Rate Terhadap Market Share Bank Syariah di Indonesia**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Equivalent Rate berpengaruh terhadap Market Share (Y) Bank Syariah

Fenomena yang tengah dihadapi perbankan syariah yaitu sulitnya menembus pangsa pasar yang sebenarnya sangat besar bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan teori market share perbankan syariah dimana perusahaan dengan nilai pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati keuntungan dan penjualan produk dengan lebih baik ketimbang pesaingnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan turunya tingkat Equivalent Rate, maka biaya yang harus dikeluarkan menimbulkan penurunan pembiayaan dan mengakibatkan rendahnya market share bank syariah. Hasil penelitian ini mendukung



hasil penelitian yang dilakukan oleh Riska Robiyanti Erlita, (2016) dimana disebutkan dalam penelitian tersebut bahwa Equivalent Rate tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap market share bank syariah di Indonesia.